

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bangsa Indonesia selain mengalami perkembangan secara pesat dalam bidang hukum semenjak era orde baru berakhir, juga mengalami perkembangan dalam bidang pendidikan, kebudayaan dan teknologi, tetapi disadari atau tidak oleh masyarakat bahwa tidak selamanya perkembangan itu membawa dampak yang positif, melainkan juga dampak negatif, seperti yang telah terjadi di masyarakat, antara lain perkosaan, pelecehan seksual terhadap anak. Hal ini menyebabkan munculnya pola-pola tingkah laku baru yang menghapus polapola lama yang mana akan menimbulkan permasalahan sosial. Problem inilah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi timbulnya kejahatan.¹

Sebagaimana kita ketahui anak adalah penerus cita-cita perjuangan suatu bangsa. Selain itu, anak merupakan harapan orang tua, harapan bangsa dan negara yang akan melanjutkan tongkat estafet pembangunan serta memiliki peran strategis, mempunyai ciri atau sifat khusus yang akan menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu, setiap anak harus mendapatkan pembinaan sejak dini, anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Terlebih lagi bahwa masa kanak-kanak merupakan periode pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri

¹ Tia Selvianti, tahun diunggah 2011, Analisis Yuridis Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur Yang dilakukan Guru Ngaji, diakses <http://digilib.unila.ac.id>, diakses 18/03/2017, Hal. 1.

seorang manusia, agar kehidupan mereka memiliki kekuatan dan kemampuan serta berdiri tegar dalam meniti kehidupan.

Tindak pidana pencabulan secara umum merupakan perbuatan atau tindakan melanggar kesusilaan yang sengaja merusak kesopanan atau orang lain tidak atas kemauan, si korban, dengan paksaan dan melalui ancaman kekerasan. Undang-undang mengancam pidana bagi siapa saja yang melanggar perbuatan tersebut. Sementara itu melalui berbagai media masa dapat diketahui hampir setiap hari terjadi kejahatan dengan berbagai jenisnya. Demikian pula dengan pelaku kejahatan sendiri, siapapun dapat menjadi pelaku dari kejahatan, apakah pelakunya masih anak-anak, orang yang berusia lanjut baik laki-laki ataupun perempuan.

Padahal, apabila mengetahui lebih dalam mengenai efek negatif dari tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur justru jauh lebih menghancurkan masa depan anak yang menjadi korbannya dengan merampas kebahagiaan seorang anak yang menjadi korbannya serta merampas secara paksa hak-hak asasi anak tersebut. Karena anak merupakan sumber potensi yang akan meneruskan pembangunan negara ini. Tindak pidana pencabulan anak di bawah umur merupakan suatu persetubuhan dengan cara paksa atau kekerasan terhadap anak dan ada juga tindak pidana pencabulan yang tidak menggunakan pemaksaan ataupun kekerasan melainkan dengan cara tipu muslihat, iming-iming dan lain-lain demi memenuhi hasrat seksualnya, oleh karena itu, penekanan angka tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur

merupakan suatu langkah yang sangat tepat dalam melakukan suatu bentuk perlindungan terhadap anak dari perlakuan salah orang lain.²

Perlindungan anak menurut undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menimbang bahwa negara indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan anak yang merupakan hak asasi manusia dan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kemudian, terkait ketentuan mengenai pencabulan terhadap anak, terdapat pada **Pasal 81** dan **Pasal 82** dalam **Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak** yang berbunyi :

Pasal 81 :

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 82 :

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau

² Armada Wina. 1989. Wajah Hukum Pidana. Cet 1. Pustaka Kartini. Jakarta. Hal. 12.

tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Saat ini tindak pidana pencabulan merupakan kejahatan yang cukup mendapat perhatian di kalangan masyarakat dan pemerintah. Terkait dengan kasus tindak pidana pencabulan penulis mengkaji kasus yang terjadi baru-baru ini siswi yang menjadi korban pencabulan seorang guru berinisial “MO” di salah satu Sekolah Menengah Pertama Islam (SMPI) Desa Tlontoraja, Kecamatan Pasean, Kabupaten Pamekasan. Jawa Timur bertambah satu orang.³

Kepala Kepolisian Resort kabupaten Pamekasan, AKBP Nowo Hadi Nugroho, S.H., S.I.K menegaskan, akan tetap mengembangkan kasus tersebut hingga tuntas. Selain itu, meminta pihak keluarga siswa yang lain agar tidak takut untuk melaporkan bila anaknya menjadi korban perbuatan tak senonoh pelaku. “Selanjutnya mungkin kita akan kembangkan lagi. Siapa tahu ada korban-korban lagi yang belum berani melapor,” ungkapnya.

Kapolres kabupaten Pamekasan menambahkan, pemeriksaan terhadap para korban maupun keluarga korban tidak dilakukan di mapolres. Akan tetapi tim penyidik mendatangi langsung rumah para korban. Itu dilakukan untuk menjaga psikologis korban. “Kita pemeriksaan tidak melakukan pemanggilan. Kita datang (rumah) korban untuk menjaga psikologis masing-masing korban,” Kapolres menandakan. Kasus pencabulan terhadap 7 siswa yang dilakukan seorang guru bernama Moh Mosleh sudah berlangsung lama. Pelaku memulai

³ Zainol, tahun diunggah 2017, Kasus Guru Cabul Kapolres Pamekasan : Korban Bertambah Satu Lagi, dalam <http://mediamadura.com>, diakses 19 Maret 2017.

aksinya terhadap siswanya itu sejak tahun 2015 silam. Pelaku secara bergantian mencabuli siswanya.⁴

Dalam melakukan aksi bejatnya itu, pelaku meraba dada hingga daerah intim siswanya. Kasus tersebut baru terungkap pada tahun 2016. Tapi keluarga korban baru melaporkan kejadian itu ke Mapolres kabupaten Pamekasan pada 18 Januari 2017 lalu. Pelaku yang ditetapkan sebagai daftar pencarian orang (DPO) oleh kepolisian akhirnya menyerahkan diri ke Polres kabupaten Pamekasan pada 28 Januari. Pelaku merupakan warga Desa Tlontoraja, Kecamatan Pasean. Sementara 7 korban inisial FN (13), AA (14), FF (13), SR (13), LAF (13), YH (13), MA (14) tercatat sebagai warga Kecamatan Pasean. Polisi belum menyebutkan identitas ketujuh korban tersebut.⁵

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DIBAWAH UMUR YANG DILAKUKAN OLEH GURU SMPI AL-HASANI BERINISIAL “MO” (Studi di Wilayah Hukum Polres Kabupaten Pamekasan)**

B. Rumusan Masalah

1. Apakah faktor–faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencabulan anak dibawah umur di lingkungan sekolah?

⁴ Ibid.

⁵ Ibid.

2. Bagaimana modus yang di lakukan guru berinisial “MO” terhadap korban pencabulan ?
3. Bagaimana upaya penanggulangan yang di lakukan pihak kepolisian, sekolah dan dinas pendidikan terhadap tindak pidana pencabulan anak dibawah umur di lingkungan sekolah ?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencabulan anak dibawah umur di lingkungan sekolah.
2. Untuk mengetahui modus apa saja yang di lakukan guru berinisial “MO” terhadap korban pencabulan.
3. Untuk mengetahui upaya penanggulangan yang di lakukan pihak kepolisian, sekolah dan dinas pendidikan terhadap tindak pidana pencabulan anak dibawah umur di lingkungan sekolah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis
 - a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya.
 - b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum, khususnya di dalam hukum pidana
 - c. Diharapkan hasil penelitian ini dapat di gunakan sebagai referensi dibidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenis.
2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memberikan wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat luas mengenai sanksi tindak pidana pencabulan anak dibawah umur.
- b. Untuk meningkatkan analisa dan pola pikir ilmiah, serta pengujian atas ilmu dan pengetahuan yang di peroleh penulis selama study di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

E. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadikan pijakan baru dibidang ilmu hukum dalam rangka menambah pengetahuan dan wawasan tentang studi kasus yang diteliti oleh penulis, sekaligus sebagai syarat akademik untuk memperoleh gelar kesarjanaan S1 dibidang ilmu hukum.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang konkrit atas study kasus yang diteliti oleh penulis, sehingga masyarakat mampu mengetahui modus-modus para pelaku dalam melakukan tindak pidana pencabulan dan memahami tentang tindak pidana pencabulan anak dibawah umur adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

3. Bagi Aparat Penegak Hukum

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi aparat penegak hukum khususnya aparat kepolisian agar dapat menjalankan tanggung jawab secara maksimal dan agar tidak terjadi tindak pidana pencabulan anak dibawah umur di lingkup sekolah.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis yaitu penelitian berdasarkan fakta–fakta yang ada di dalam masyarakat tentang tindak pidana pencabulan anak dibawah umur yang dilakukan oleh seorang guru SMPI Al-Hasani berinisial "MO".

2. Lokasi Penelitian

Lokasi peneltian di wilayah hukum polres Kabupaten Pamekasan lebih difokuskan di salah satu SMPI Al-Hasani yang beralamat di Dusun Bajur Timur, Desa Tlonto Raja, Kecamatan Pasean, Pamekasan, Madura, dan di Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan yang beralamat di Jl. Raya Proppo, Pamekasan, Madura, dan di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (P3A & KB) yang beralamat di Jl. Pintu Gerbang 38, Pamekasan, Madura, serta di Kanit PPA Polres Pamekasan yang beralamat di Jl. Stadion 81, Pamekasan Madura untuk mendapatkan data yang akurat yang sesuai dengan permasalahan yang dipaparkan oleh penulis.

3. Jenis Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh dari lokasi penelitian mengenai tindak pidana pencabulan anak dibawah umur yang dilakukan oleh guru SMPI Al-Hasani, adapun jenis data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dari pihak yang terkait.

- b. Data Sekunder diperoleh dengan cara melakukan studi kepustakaan melalui bahan-bahan literatur yaitu peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan penelusuran situs internet yang berhubungan dengan penulisan ini.
- c. Data Tersier terdiri dari kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Indonesia *Kontemporer*, yang dapat memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap data primer maupun data sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara secara langsung dengan pihak yang terkait, yaitu :

1. Korban / Keluarga korban:

- a) Bapak dari korban berinisial FN (13 Tahun)
- b) Bapak dari korban berinisial AA (14 Tahun)
- c) Ibuk dari korban berinisial FF (13 Tahun)
- d) Bapak dari korban berinisial SR (13 Tahun)
- e) Ibuk dari korban berinisial LAF (13 Tahun)
- f) Paman dari korban berinisial YH (13 Tahun)
- g) Bapak dari korban berinisial MA (14 Tahun)

2. Pihak Sekolah (Rekan Guru / Kepala Yayasan) : Kiai Kamiluddin selaku Ketua Yayasan Pendidikan Islam AL-AMIEN.

3. Dinas Pendidikan;

4. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (P3A & KB);

5. Kanit PPA Polres Pamekasan.

b. Observasi

Observasi adalah penulis melakukan pengamatan di unit PPA Polres Kabupaten Pamekasan yaitu tentang pelaksanaan proses penyidikan tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh guru, untuk menemukan data-data yang terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

c. Studi Kepustakaan

Yaitu dengan melakukan penelusuran dan pencarian bahan-bahan kepustakaan dari berbagai literatur atau buku-buku, situs internet, dan jurnal.

5. Analisa Data

Setelah dilakukan pengumpulan data kualitatif, baik yang berasal dari studi lapangan maupun studi kepustakaan dianggap cukup, maka data kualitatif tersebut diolah dengan metode deskriptif yaitu analisa dengan menggambarkan fenomena yang diteliti secara sistematis, faktual, dan akurat yang berkaitan dengan tindak pidana pencabulan anak dibawah umur yang dilakukan oleh seorang Guru SMPI Al-Hasani di wilayah hukum polres Kabupaten Pamekasan.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan penulisan hukum ini, penulis membagi kedalam 4 bab dan masing-masing bab terdiri atas sub yang bertujuan untuk mempermudah pemahamannya. Adapun sistematika penulisannya sebahai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan kerangka awal penulisan. Dalam bab pertama ini akan menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan menampilkan tinjauan pustaka yang terdiri dari tinjauan umum tentang kriminologi, tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang pencabulan, tinjauan umum tentang anak, tinjauan umum tentang guru, tinjauan umum tentang sekolah, dan tinjauan umum tentang kepolisian.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan pembahasan pokok atas permasalahan yang ada dalam penulisan penelitian hukum ini yang sudah dipaparkan sebelumnya.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan dan saran dari penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis.